



## **Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Perumnas Mandala Program Bantuan Sosial**

**Ade Fitri Sihombing<sup>1</sup>, Anjelina Pasaribu<sup>2</sup>, Dedek Harianto<sup>3</sup>, Ikhsanul Fadly Butar-Butar<sup>4</sup>, Nadila Septiani Ritonga<sup>5</sup>, Satya Nofryanti<sup>6</sup>, Prayetno<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>adefitriborujontan02@email.com, <sup>2</sup>anjinapasaribu9@email.com,

<sup>3</sup>dedekhario889@gmail.com, <sup>4</sup>ikhsanulfadly245@gmail.com, <sup>5</sup>nadilaritonga141@gmail.com,

<sup>6</sup>nainggolansatya9@gmail.com, <sup>7</sup>eno.pray@gmail.com

### **Abstrak**

Bantuan program sosial merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin. Namun, meskipun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan program sosial, implementasi yang efektif dan efisien masih menjadi tantangan. Masih ada permasalahan dalam distribusi bantuan, penentuan penerima bantuan yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menyediakan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus program sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan kualitas data penerima bantuan, mekanisme distribusi bantuan yang tidak efektif, serta kurangnya imunitas antar instansi terkait. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kualitas penerima bantuan data, memperbaiki mekanisme distribusi bantuan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Hak Konstitusional, Masyarakat, Bantuan Sosial

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi miskin yang signifikan. Masyarakat miskin di Indonesia sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program sosial, termasuk bantuan program sosial. Namun kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, dan banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses hak-hak konstitusional mereka, termasuk hak atas layanan kesehatan. Salah satu program sosial pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin adalah Program Bantuan Sosial.

Bantuan program sosial merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin. Hak konstitusional ini termasuk dalam UUD 1945, Pasal 28D yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh perlindungan sosial. Namun, meskipun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan program sosial, implementasi yang efektif dan efisien masih menjadi tantangan. Masih ada permasalahan dalam distribusi bantuan, penentuan penerima bantuan yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi memiliki tantangan dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin. Hak konstitusional masyarakat miskin termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan keamanan sosial. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, meskipun adanya program-program bantuan sosial ini, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin. Beberapa

kendala yang sering dihadapi adalah adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan, kurangnya pendekatan holistik dalam penanggulangan kemiskinan, serta banyaknya regulasi yang masih menghambat akses masyarakat miskin terhadap program bantuan.

Penelitian atau analisis kebijakan merupakan alat yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin. Dalam studi kasus ini, fokus analisis akan ditujukan pada bantuan program sosial yang menjadi instrumen utama dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia.

Studi kasus pada bantuan program sosial menjadi penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia. Studi tersebut dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Melalui analisis kebijakan, dapat diidentifikasi perbedaan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasinya di lapangan. Masalah seperti korupsi, birokrasi yang lambat, ketimpangan distribusi bantuan, atau kurangnya partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi sebagai hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin. Selain itu, analisis kebijakan juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial. Rekomendasi tersebut dapat mencakup perubahan dalam desain kebijakan, perbaikan dalam mekanisme distribusi dan pemilihan penerima, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi program.

Melalui analisis kebijakan, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bantuan sosial, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, mekanisme penyaluran bantuan yang digunakan, serta partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Selain itu, juga perlu diperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari program bantuan sosial ini terhadap masyarakat penerima, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan implementasi program bantuan sosial, diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin. Implementasi program yang lebih efektif dan efisien akan membantu meningkatkan akses dan pengaruh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih Nyata dan menyeluruh. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Jadi dalam hal ini peneliti meneliti pada elemen manusia sebagai responden dari kajian penelitian yang akan dibahas, peneliti melakukan observasi langsung ke Perumnas Mandala Jalan Pipit Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya melakukan Wawancara kepada masyarakat daerah perumnas mandala. Kemudian untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian, Peneliti menggunakan literatur bacaan sebagai memperkuat hasil pembalasan melalui seperti jurnal dan buku-buku/e-book serta bahan bacaan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Pemerintah Dalam memenuhi Hak Konstitusional Masyarakat kurang mampu di Indonesia dengan fokus pada Program Bantuan Sosial dapat mencakup beberapa Program bantuan Indonesia adalah rumah bagi salah satu program bantuan tunai bertarget terbesar di negara berkembang, yaitu program Bantuan Langsung Tunai (Abhijit Banerjee, 2014). Evaluasi efektivitas Program Bantuan Sosial, termasuk sejauh mana program ini telah berhasil dalam memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat kurang mampu. dengan itu dapat di evaluasi berdasarkan berbagai faktor, antara lain dampaknya terhadap populasi sasaran, efisiensi pelaksanaan, dan kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan. Namun ektivitas program bantuan sosial didaerah perumnas mandala tidak merata, menurut warga setempat.

Menurut worldbank.org salah satu tantangan utama program bantuan sosial adalah untuk memastikan program tersebut dapat menjangkau kelompok yang paling rentan atau masyarakat kurang mampu, saat ini beberapa program tidak mencakup banyak orang dan manfaat nya mungkin tidak cukup atau tidak tepat waktu. Beberapa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan target yang akurat dan memperluas cakupan program program untuk menjangkau jumlah yang lebih besar dari kelompok yang membutuhkan. Masyarakat di daerah perumnas pernah mengadu belum mendapatkan bantuan sosial, tetapi pemerintahan setempat hanya mendata dan belum ada Tindakan selanjutnya, untuk memberi bantuan sosial selanjut nya.

Persepsi masyarakat terhadap efektivitas program bantuan pemerintah dapat mempengaruhi dukungan dan penerimaannya. Jika program-program tersebut dipandang berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran, maka program-program tersebut kemungkinan besar akan dipandang positif. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menerima bantuan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap program dibandingkan mereka yang tidak menerima bantuan (Husni et al. 2023), namun program bantuan pemerintahan sering tidak merata kepada masyarakat sering terjadi kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan, dan masyarakat lanjut usia belum pernah mendapatkan bantuan sekitar daerah perumnas mandala.

#### **A. Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan Sosial**

Keadilan sosial merupakan prinsip yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang beradab titik prinsip ini menuntut adanya pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan titik salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan sosial adalah melalui program bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial pada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial di Indonesia. Keadilan sosial merupakan hal yang akan tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa subsidi beras Sejahtera, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai program Indonesia sehat, program Indonesia pintar, dan masih banyak program-program pemerintah lainnya. Bantuan sosial itu tentunya ditujukan kepada individu yang membutuhkan baik itu belajar, keluarga, maupun penerima manfaat lainnya.

Bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan serta perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan titik tujuan utama adanya bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip keadilan sosial, bantuan sosial harus telah diberikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat miskin tanpa memandang perbedaan agama kemasukan atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan titik Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat Mandiri dan berdaya saing di tengah persaingan Global. Dengan demikian bantuan sosial pada masyarakat miskin dapat menjadi jalan keluar sementara dalam mengatasi kemiskinan namun upaya jangka panjang yang lebih berkelanjutan juga diperlukan.

Dari observasi yang telah kami lakukan di Perumnas Mandala Jalan Pipit Kabupaten Deli Serdang Kami mendapatkan keterangan bahwa penyaluran program bantuan pemerintah di lokasi tersebut belum dilakukan dengan merata, masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan tersebut itu tidak mendapatkan bantuan tersebut. Di lokasi penelitian tersebut masih terdapat berapa masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan masyarakat lanjut usia yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Perumnas Mandala. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial ini masih belum Sesuai dengan prinsip keadilan sosial, karena masih terdapat beberapa permasalahan di mana masyarakat tidak mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah sedangkan mereka merupakan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah (Sri Hartati, S.H. 2022).

#### **B. Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial dalam Memenuhi Hak Konstitusional Masyarakat Miskin**

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak konstitusional mereka dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun efektivitas dari pemberian bantuan sosial ini menjadi hal yang perlu diperhatikan agar dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Artinya, penyaluran dari bantuan sosial ini harus tepat sasaran, artinya bantuan tersebut harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dan objektif dalam menentukan kriteria menerima bantuan, seperti dengan menggunakan data kemiskinan yang akurat dan terkini. Salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas bantuan sosial adalah keterjangkauan. Artinya, bentuk sosial haruslah mudah diakses oleh masyarakat miskin tanpa adanya tambahan ataupun hambatan biaya administratif atau birokrasi yang berlebihan. Proses pendaftaran, penyaluran dan pencairan bantuan haruslah sederhana dan efisien agar tidak menghambat akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Program bantuan sosial haruslah direncana dengan memperhatikan aspek pendidikan, keterampilan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar dapat lebih efektif dalam membantu mereka agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah juga harus menjalankan mekanisme pengawasan yang tetap dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan Devaluasi program. Hal ini digunakan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan, Korupsi atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberian bantuan sosial diantaranya:

1. Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu.
2. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial. Hal ini ditujukan agar dapat memastikan bahwa program bantuan sosial berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta dapat memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas program bantuan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial agar program bantuan sosial tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran (Mufida 2021).

### **C. Tantangan atau Masalah yang Perlu Diatasi**

Salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia adalah belum meratanya distribusi bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Menteri Pembangunan dan kebudayaan menunjukkan bahwa banyak orang di daerah tersebut yang membutuhkan bantuan sosial tetapi tidak menerimanya. Tidak lagi memenuhi syarat. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan kelayakan bantuan sosial yang akurat dan terkini, dan bahwa penyalurannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Memastikan bahwa program bantuan sosial efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin merupakan tantangan tambahan. Hal ini membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap program untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat miskin. Terakhir, perlu membangun kapasitas analisis kebijakan dan pejabat pemerintah lainnya yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program.

### **D. Rekomendasi Kebijakan Menurut Pandangan Mahasiswa**

Berdasarkan sudut pandang mahasiswa, berikut beberapa rekomendasi kebijakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia, khususnya dalam konteks bantuan sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penargetan program bantuan sosial untuk memastikan bahwa program tersebut menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data yang lebih akurat dan terkini untuk menentukan kelayakan bantuan, dan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam identifikasi penerima manfaat.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial dengan memberikan laporan rutin mengenai pelaksanaan dan hasil program, serta dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemantauan dan evaluasi.
3. Memperkuat kapasitas pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program bantuan sosial, melalui pelatihan dan inisiatif peningkatan kapasitas lainnya.
4. Memastikan bahwa program bantuan sosial dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang meningkatkan martabat dan pemberdayaan penerima manfaat, bukan melanggengkan ketergantungan.
5. Meningkatkan keseluruhan pengeluaran pemerintah untuk program-program bantuan sosial, untuk memastikan bahwa program-program tersebut didanai secara memadai dan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Rekomendasi ini didasarkan pada gagasan bahwa program bantuan sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusi sosial, namun program tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin. Dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, para pengambil kebijakan dapat membantu memastikan bahwa program bantuan sosial lebih efektif dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dengan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama program bantuan sosial adalah untuk memastikan program tersebut dapat menjangkau kelompok yang paling rentan atau masyarakat kurang mampu, saat ini beberapa program tidak mencakup banyak orang dan manfaatnya mungkin tidak cukup atau tidak tepat waktu. Namun program bantuan pemerintahan sering tidak merata kepada masyarakat sering terjadi kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan, dan masyarakat lanjut usia belum pernah mendapatkan bantuan sekitar daerah perumnas mandala Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan Sosial Keadilan sosial merupakan prinsip yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang beradab titik prinsip ini menuntut adanya pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan titik salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan sosial adalah melalui program bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan serta perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan titik tujuan utama adanya bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung.

Dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan titik Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat Mandiri dan berdaya saing di tengah persaingan Global. Namun efektivitas dari pemberian bantuan sosial ini menjadi hal yang perlu diperhatikan agar dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Artinya, penyaluran dari bantuan sosial ini harus tepat sasaran, artinya bantuan tersebut harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Hal ini ditujukan agar dapat memastikan bahwa program bantuan sosial berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta dapat memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin. Pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husni, Alfi et al. 2023. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Air Asuk Kec. Siantan Tengah Kab. Kepulauan Anambas)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4(2): 1125–44.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Mufida, Nisa'ul. 2021. "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Sosial Sains* 1(2): 82–92.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73-96.
- Sri Hartati, S.H., M.H. 2022. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin." *Pengadilan Agama Pasarwajo*.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2).